BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, mendukung pembangunan ekonomi, dan memperkuat kehidupan sosial budaya masyarakat. Namun, dalam konteks Indonesia yang memiliki wilayah geografis luas dan keberagaman budaya, sosial, serta ekonomi, pendekatan terpusat dalam penyelenggaraan pendidikan sering kali kurang mampu mengakomodasi kebutuhan dan potensi lokal. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di daerah menjadi penting sebagai upaya untuk menjawab tantangan ini.

Desentralisasi pendidikan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih berperan dalam mengelola sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan masyarakat setempat, pendidikan di daerah dapat lebih relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan.

Dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pendidikan di daerah, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan tercapainya tujuan nasional di bidang pendidikan, sekaligus mendorong pemberdayaan lokal. Dengan demikian, pendidikan di daerah tidak hanya menjadi sarana pengembangan individu, tetapi juga instrumen

penting dalam memperkuat identitas lokal dan mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak dan fondasi penting bagi kemajuan individu serta masyarakat. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi sistem pendidikan di Indonesia adalah tingginya angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan akses, fasilitas, dan sumber daya. Fenomena ini tidak hanya menghambat pengembangan potensi generasi muda, tetapi juga berdampak negatif pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Penyelenggaraan pendidikan yang efektif di tingkat daerah menjadi kunci utama dalam menanggulangi masalah ini. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan lokal, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih relevan dan tepat sasaran, seperti penyediaan akses pendidikan di wilayah terpencil, penguatan bantuan keuangan untuk siswa kurang mampu, serta pemberdayaan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak.

Selain itu, pendidikan yang dikelola secara efektif di daerah mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah anak. Dengan mengatasi hambatan seperti jarak geografis, biaya pendidikan, serta kurangnya infrastruktur, daerah dapat memastikan bahwa semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

Penyelenggaraan pendidikan yang terfokus pada pengurangan angka putus sekolah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan angka

partisipasi pendidikan, tetapi juga membantu menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan, sekaligus memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, pemerintah merancang Peta Jalan Pendidikan yang menekankan pada pemerataan akses, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan karakter peserta didik. Dokumen ini menjadi acuan strategis dalam pembangunan pendidikan jangka panjang di Indonesia.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon tentang wajib belajar 9 Tahun. Dengan demikian, Pasal 34 UU 20/2003 khususnya Ayat 1 “Setiap warga

negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar" gugur dengan sendirinya.

Salah satu sistem pendidikan yang dinilai oleh sejumlah pihak akan efektif dan optimal dalam rangka melakukan akselerasi pendidikan di Indonesia yakni melalui program full day school atau Sekolah Sepanjang Hari (Elfrianto et al., 2023). Pentingnya akselerasi pendidikan di Papua merupakan kebutuhan yang sangat krusial di Papua saat ini. Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia. Nilai IPM Provinsi Papua Barat pada 2020 berada di urutan ke 33 dan Provinsi Papua berada di urutan ke-34 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia (Sumule et al., 2024).

Sebagaimana kerja sama yang dibangun oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Universitas Papua yang ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan nomor 890/174/55/2023 dengan pihak Universitas Papua nomor 487/UN42/KS/2023 pada hari Sabtu, 29 April 2023 tentang Penelitian keterlibatan Penduduk Usia Sekolah dan Pengembangan Model Pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan. Ruang lingkup perjanjian tersebut meliputi penjaringan masalah pendidikan di kabupaten Sorong Selatan, survei dan validasi data di tingkat kampung, diseminasi dan publikasi, pengembangan model-model pendidikan, monitoring dan evaluasi, serta rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dirilis oleh tim peneliti Universitas Negeri Papua (UNIPA) bahwa

terdapat 6.877 penduduk usia sekolah namun tidak menyelesaikan sekolahnya hingga ditamatkan di Kabupaten Sorong Selatan (Media online www.sorongnews.com yang dirilis pada 21 September 2023).

Sebagai wujud perhatian terhadap permasalahan tingginya angka putus sekolah, pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan bekerja sama dengan Universitas Negeri Papua (UNIPA). Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah merekomendasikan untuk menerapkan *all day schooling* (Sekolah Sepanjang Hari). Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menyiapkan anggaran Rp. 20 Miliar untuk menanggung biaya pendidikan dan seragam sekolah bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya. Bahkan, anggaran tersebut juga mengakomodir dalam menyiapkan sarapan dan makan siang peserta sebelum dikembalikan ke orang tuanya pada sore hari.

Program Sekolah Sepanjang Hari yang telah digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menunjuk Kecamatan Konda sebagai pilot project (pecobaan) yang dipusatkan di SD Inpres 11 Kecamatan Konda dengan jumlah peserta didik 105 orang, 22 orang diantaranya adalah kelas khusus (yang putus sekolah). Program tersebut telah berlangsung selama empat bulan terhitung sejak November 2023 hingga Desember 2024. Seiring berjalannya waktu Jumlah anak yang bersekolah sepanjang hari saat pertama kali dibuka hanya sembilan orang, dan seiring berjalannya waktu jumlah anak tersebut bertambah. Sejumlah anak putus sekolah masih tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga mereka akan mendapat ijazah setelah kembali

bersekolah. Selanjutnya, Apabila hasil evaluasi menunjukkan perkembangan yang signifikan, maka anak dipindahkan dari kelas kesetaraan ke kelas reguler sesuai tingkat usia (Media online www.sorongnews.com yang dirilis pada 21 September 2023).

Tabel 1

Data Pengelolaan Program Sekolah Sepanjang Hari

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Unsur yang Dilibatkan	Peran
1	Pengelola	5	Universitas Papua	Mengelola program
2	Peserta didik (Siswa)	22	Masyarakat Distrik Konda	Mengikuti program
3	Tenaga pengajar	3	SDI 11 Konda	Memberikan materi di kelas
		2	SDN 16 Teminabuan	Memberikan materi di kelas
4	Juru masak	5	Masyarakat Distrik Konda	Memasak untuk makanan peserta didik
5	Juru Laundry	2	Masyarakat Distrik Konda	Mencuci dan merapikan pakaian peserta didik
6	Pengawas		Pemerinta Daerah Kab. Sorong Selatan	Melakukan pengawasan terhadap jalannya progam

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan, 2025

Tabel 1 di atas menyajikan informasi mengenai pengelolaan Program Sekolah Sepanjang Hari di Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Program ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, baik dari institusi pendidikan, masyarakat lokal, maupun pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan pendidikan yang memperhatikan keterlibatan multi-pihak.

Unsur utama dalam pelaksanaan program ini terdiri dari pengelola, peserta didik, tenaga pengajar, juru masak, juru laundry, dan pengawas. Pengelolaan program dilakukan oleh lima orang dari Universitas Papua yang bertugas sebagai pengelola utama. Ini menunjukkan adanya peran serta lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung program pendidikan dasar di wilayah tersebut.

Peserta didik dalam program ini berjumlah 22 orang dan berasal dari masyarakat Distrik Konda. Keterlibatan mereka mencerminkan bahwa sasaran program adalah anak-anak dari komunitas lokal. Selanjutnya, tenaga pengajar yang terlibat berasal dari dua sekolah dasar, yakni SDI 11 Konda (3 orang) dan SDN 16 Teminabuan (2 orang), dengan tanggung jawab memberikan materi pembelajaran di kelas. Hal ini menandakan adanya dukungan dari institusi pendidikan formal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di program ini.

Selain aspek akademik, program ini juga mencakup dukungan terhadap kebutuhan dasar peserta didik, seperti konsumsi dan kebersihan. Sebanyak lima orang dari masyarakat Distrik Konda berperan sebagai juru masak yang menyiapkan makanan untuk peserta didik, sedangkan dua orang lainnya bertugas sebagai juru laundry yang mencuci dan merapikan pakaian siswa. Peran-peran ini menunjukkan perhatian terhadap aspek kesejahteraan peserta didik selama mengikuti program.

Pengawasan terhadap jalannya program dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam fungsi pengawasan menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tetap berada dalam koridor kebijakan publik.

Data dalam tabel ini menunjukkan adanya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi, sekolah dasar, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Program Sekolah Sepanjang Hari. Pola kolaboratif ini dapat menjadi model yang potensial untuk direplikasi dalam

konteks wilayah lain dengan kebutuhan pendidikan serupa, khususnya di daerah terpencil atau terluar.

Proses pembelajaran SSH di SD Inpres 11 Konda dimulai dari jam 07.15 WIT sampai dengan jam 17.00 WIT. Pelaksanaannya dibagi dalam 2 fase waktu, yaitu pada pukul 07.15 sampai dengan pukul 13.00 proses pembelajaran diambil alih oleh guru-guru SD Inpres 11 Konda. Selanjutnya pada pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT diambil alih oleh tim pengelolah SSH. Setiap siswa yang dikategorikan masuk dalam kelompok SSH setiap hari diberi makan tiga kali sehari. Pada pagi hari diberi sarapan dalam bentuk snack, kemudian pada pukul 12.00 WIT mereka makan siang dan pada pukul 17.00 WIT sebelum kembali kerumah masing-masing, kembali lagi diberikan makanan tambahan.

Masyarakat (putus sekolah) dibukakan ruang belajar dengan dibukakannya kelas sehari penuh setiap pekannya untuk belajar sesuai dengan tingkat usianya. Mereka masuk dalam kelas kesetaraan sehingga bisa mengikuti proses pendidikan minimal dua semester. Peserta Sekolah Sepanjang Hari juga diberikan materi literasi dasar yang nantinya akan dievaluasi pada awal dan akhir semester. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan masing-masing peserta.

Program Sekolah Sehari memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perpanjangan jam belajar di sekolah. Program Sekolah Sepanjang Hari memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat lebih dalam kegiatan akademis dengan hanya mengikuti sehari saja. Program Sekolah Sepanjang Hari memungkinkan penyampaian materi

pelajaran dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Tenaga Pengajar juga dapat menggunakan metode pengajaran yang lebih variatif dan interaktif yang dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi pelajaran. Program Sekolah Sepanjang Hari dapat memberikan manfaat khusus bagi peserta dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu karena semua ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan, bahkan disiapkan sarapan dan makan siang sebelum pulang sekolah (Media online www.sorongnews.com yang dirilis pada 21 September 2023).

Namun, seiring berjalannya waktu, program Sekolah Sepanjang Hari mengalami kendala dalam penerapannya. Dengan demikian, program tersebut menjadi kurang efektif. Tenaga pengajar yang dilibatkan adalah dosen dari Universitas Negeri Papua (UNIPA). Seharusnya tenaga pengajar yang dilibatkan secara langsung adalah tetap memberdayakan guru yang ada, namun tetap dalam pendampingan oleh pihak UNIPA. Hal tersebut mengingat bahwa enaga pengajar juga butuh pengembangan kompetensi sehingga dapat mentransfer ilmunya dengan maksimal kepada peserta didiknya. Dengan demikian, anggaran yang disiapkan tersebut, bukan hanya dinikmati oleh pihak mitra (UNIPA) semata, melainkan juga dapat dinikmati oleh pihak guru di lingkup Kabupaten Sorong Selatan sebagai penambah motivasinya dalam menjalankan tugasnya (Media online www.sorongnews.com yang dirilis pada 21 September 2023).

Pelaksanaan suatu pembelajaran dengan konsep SSH, idealnya menerapkan sistem pembelajaran integrated activities dan integrated curriculum. Konsep kegiatan pembelajaran tersebut mulai dari belajar,

bermain, makan, dan beribadah menjadi sebuah sistem yang utuh dan saling mempengaruhi satu sama lain (Wijaya & Djono, n.d.). Tujuannya, untuk memberikan penanaman nilai nilai kehidupan harmonis pada anak didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pengintegrasian kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang utuh sesuai dengan nilai-nilai kultur budaya dan falsafah bangsa.

Hal yang sama juga berlaku dengan adanya program SSH yang ada di Sorong Selatan yang tentu memerlukan daya upaya dalam hal ketersedian anggaran yang memadai. Hal ini dikarenakan suatu sekolah dengan konsep SSH harus terpenuhi ketersediaan sarana dan prasarannya seperti ketersediaan gedung dengan standar SSH, kurikulum sesuai dengan standar SSH, makanan untuk para siswa, pakaian dan terlebih ketersediaan guru dan staf pendukung.

Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi seiring berjalannya program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) ini. Pelaksanaan SHH di SD Inpres 11 Konda, semuanya diambil alih oleh tim pendamping baik dalam hal perancangan sistem pembelajaran juga dalam hal pelibatan tenaga guru didalam SSH tersebut. Guru yang dilibatkan sebagai tenaga pengajar hanya sebagian saja, bahkan sampai saat ini hanya ada 3 guru yang dilibatkan dalam SSH di SD Inpres 11 Konda tersebut. Salah satu kendala mendasar pelaksanaan SHH di SD Inpres 11 Konda Sorong Selatan adalah masalah manajemen SSH. Mungkin karena ini sifatnya pilot project sehingga optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia di SD Inpres

11 Konda belum maksimal digunakan. Sari sisi pengembangan kurikulum masih sangat terbatas. Ini dikarenakan belum ada formulasi yang baku yang telah disusun dan disepakati oleh pemangku kepentingan yang ada di Sorong Selatan berkaitan dengan pelaksanaan program SSH ini. Selanjutnya, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program SSH. Di SD Inpres 11 Konda sendiri, sarana dan prasarana masih sangat terbatas (Yustianto, dkk, 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penyelenggaraan Sekolah Sepanjang Hari di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan Sekolah Sepanjang Hari di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan implementasi program " Sekolah Sepanjang Hari." Informasi ini membantu pemerintah daerah dan pihak sekolah dalam meningkatkan strategi pembelajaran, metode pengajaran, serta

pengelolaan waktu belajar siswa agar lebih efektif. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pendidikan lokal yang lebih relevan dan berbasis bukti. Model " Sekolah Sepanjang Hari " yang terbukti efektif dapat direplikasi atau disesuaikan untuk diterapkan di distrik lain dengan karakteristik serupa.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi. Selanjutnya, diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam konteks inovasi pendidikan di daerah. Selanjutnya, dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan pendidikan berbasis daerah dan relevansi desentralisasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.